

PERALIHAN KERAJAAN ISLAM SECARA DAMAI DARI HASAN BIN ALI KEPADA MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN

Noer Adektya Ekaviana

UIN Sunan Ampel Surabaya

nellaadek@gmail.com

Abstract: This article examines the causes, processes, and impacts resulting from the transfer of Islamic power from Hasan to Muawiyah. The approach is a political history with theoretical analysis using the theory of power from Max Weber. The results of this study show the event of political transition that involved two important figures namely Muawiyah and Hasan was caused by several factors. The process also had consequences for the life of Muslims in many aspects. The results that the conflict between Kubu Muawiyah and Hasan is a remnant of the earlier conflict between the Islamic community and its rulers. Utamanya ever since Utsman Bin Affan's early days. The most striking aspect of these two historical figures' combined efforts to find a solution to the damai problem in order to end the persecutory berdarah between Muslims is their use of catatan emas as a result of their pragmatism and leadership.

Keywords: *political transition, Muawiyah, Hasan, Islam, unity*

PENDAHULUAN

Islam masuk di Jawa mengalami akulturasi budaya dengan pemahaman yang telah dianut sebelumnya, dan tentunya Islam di Jawa memiliki keunikan tersendiri, yang sebelumnya oleh para Wali di dakwahkan dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam dakwah yang mereka lakukan, strategi dakwah yang dilakukan sangatlah menarik, jika ditinjau dari sudut pandang agama terdapat sinkretisme antara budaya Jawa dengan Islam, sehingga ada alasan mengapa Islam mudah diterima dan berkembang pesat di Jawa, menurut A. Jamil (Jamil dkk, 1999: 89-90) ada tiga alasan yang mempengaruhi Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Pertama, ketika Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan dan didorong oleh goyahnya kepercayaan masyarakat Jawa terhadap Hindu-Budha yang mengakibatkan Islam secara perlahan mudah diterima. Kedua, Islam adalah agama yang menyamakan derajat sesama manusia tanpa memandang kasta yang menjadi simbol kedudukan manusia yang satu lebih rendah dari manusia yang lainnya, yang secara tidak langsung Islam menawarkan kesetaraan antara sesama manusia. Ketiga, pandainya seorang guru dalam mendakwahkan Islam dengan strategi yang cukup unik, yaitu dengan hal yang paling mendasar melalui penyesuaian tingkah laku, sehingga ajaran Islam secara tidak langsung masuk dan mudah diterima oleh masyarakat Jawa kala itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam berkembang di

Nusantara khususnya Jawa, melalui perpaduan kultur masyarakat Jawa sebelumnya dengan Islam, dan setiap ajaran Islam yang diajarkan pada masyarakat Jawa tentunya membutuhkan perenungan yang mendalam yang lebih dikenal dengan *manunggaling kawula gusti*.

Islam bukan organisasi politik, namun kehadirannya telah membawa implikasi politik. Perpolitikan dalam Islam sudah terjadi sejak masa Nabi Muhammad. Hal itu dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang dilalui oleh beliau dan pengikutnya. Diantara peristiwa penting itu adalah perjanjian Aqabah I dan II, penyepakatan Piagam Madinah, pengiriman surat dan delegator dengan berbagai misi, perjanjian Hudaibiyah serta operasi militer atau perang. Berbagai perjanjian termasuk di dalamnya penyepakatan Piagam Madinah dan pengiriman surat yang dilakukan oleh Nabi merupakan langkah-langkah diplomatis untuk mewujudkan misinya secara damai. Hal ini merupakan peradaban politik dalam bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Nabi. Penyepakatan Piagam Madinah bagi para pakar politik, dianggap sebagai sebuah undang-undang, karena dengan adanya Piagam Madinah terwujudlah sebuah masyarakat politik yang di dalamnya terdapat pemimpin, warga, undang-undang, wilayah dan kedaulatan. Piagam Madinah tersebut berisi prinsip-prinsip bernegara yaitu keadilan, persamaan, musyawarah, dan ketaatan pada pimpinan. Dalam hal perang hanya sebagai bagian kecil dari perwujudan politik. Ada hal lain yang penting dari peristiwa perang pada masa Nabi Muhammad selain kekerasan dan pembunuhan. Bahwa peperangan dilakukan sebagai akibat dari gangguan yang mengancam keselamatan kaum Muslimin. Selain itu, Nabi selalu mengajak bermusyawarah kepada para sahabatnya dalam menghadapi perang (Syaefudin, 2013: 166). Menurut Nurcholis Madjid menyatakan bahwa agenda-agenda politik kerasulan telah diletakkan dan beliau bertindak sebagai utusan Allah, kepala negara, komandan tentara, dan pemimpin kemasyarakatan (Supriyadi, 2016: 65).

Kemudian perpolitikan dalam Islam berlanjut pada masa Khulafaurrasyidin yang dimulai dari pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebelum ia diangkat menjadi pemimpin, terjadi permasalahan pertama pada badan umat Islam. Permasalahan pertama yang dihadapi setelah Nabi Muhammad meninggal adalah tentang kepemimpinan umat dan pemegang kekuasaan tertinggi. Beliau tidak menunjuk pengganti dan tidak juga memberikan pesan bagaimana cara penggantian kepemimpinan dan pemegang kekuasaan tertinggi di kalangan umat Islam dilaksanakan. Tetapi pada dasarnya, beliau

meninggalkan prinsip-prinsip pemecahan masalah dengan menggunakan musyawarah. Atas ketidakpastian siapa pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam, kelompok Muhajirin dan Anshar mengalami silang sengketa. Mendengar keadaan tersebut Umar Bin Khattab segera mengajak Abu Bakar menuju ke Saqifah, untuk menghadiri pertemuan (Ibnu Hisyam, 2013: 748). Dalam hal itu Abu Bakar memberikan solusi atas perdebatan siapa yang akan mengganti kepemimpinan Rasulullah. Beliau mengajukan argumen pilihannya yakni atas dasar sabda Rasul yang menghendaki pemimpin itu dari suku Quraisy, karena jika diangkat pemimpin dari kaum Anshar dikhawatirkan terjadi perdebatan lagi antara suku Khazraj dan suku Auf yang selalu bermusuhan sebelum Nabi Muhammad mendamaikannya.

Atas dasar argumentasi diatas Abu Bakar mengusulkan opsi antara Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Orang-orang Islam tampaknya tertarik oleh ucapan Abu Bakar. Kemudian Umar menghampiri Abu Bakar dan berbaiat kepadanya. Lalu kaum muslimin pun mengikutinya, sehingga Abu Bakar terpilih menjadi Khalifah menggantikan Rasulullah. Abu Bakar menjadi Khalifah pertama dalam perpolitikan Islam. Ia menjadi Khalifah dari tahun 632-634 M/11-13 H atau 2 tahun 3 bulan 11 hari dalam usia 61 tahun. Meskipun Abu Bakar menjadi Khalifah, beliau tetap hidup dalam kesederhanaan (Syaefudin, 2013: 167-169).

Kemudian perpolitikan dalam Islam berlanjut di pemerintahan Umar bin Khattab. Abu Bakar ingin mencari penggantinya sebelum sakitnya semakin parah. Maka, jatuhlah pilihannya kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar memilih Umar karena untuk menghindari konflik antar umat Islam yang pernah terjadi saat pengangkatannya menjadi pemimpin. Ia juga mempertimbangkan saran dari para sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan dari kalangan Muhajirin serta Aid bin Khudair dari kalangan Anshar. Akhirnya mereka menyetujui pilihan Abu Bakar. Kemudian ia membaiat Umar dan diikuti oleh kaum muslimin. Setelah proses pembaiatan, beberapa hari kemudian Abu Bakar meninggal (Usairy (al), 2018: 155). Pada tahun 634-644 M/13-23 H atau selama 10 tahun dalam usia 57 tahun, Umar bin Khattab menjabat sebagai Khalifah. Selama menjadi Khalifah Umar bergaya hidup sederhana dan hemat, tetap mencari penghidupannya dengan cara berdagang (Syaefudin, 2013: 170). Selain itu ekspansi perluasan wilayah Islam pada masa Umar bertambah. Banyak daerah yang telah ditaklukan olehnya.

Selanjutnya kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh Usman bin Affan. Perpolitikan dalam Islam terlihat lebih nyata pada masa ini. Sebelum Usman diangkat menjadi Khalifah terjadi peristiwa yang menimpa Umar bin Khattab. Ia meninggal karena ditusuk dengan belati beracun oleh Abu Lu'luah Al-Majusi yang merupakan mantan budak Persia. Hal itu terjadi karena orang-orang Yahudi dan Persia merasa bahwa Umar adalah penyebab musnahnya kekuasaan mereka. Sebelum Umar wafat, ia menunjuk dewan formatur yang anggotanya terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Zubair, dan anak Umar bin Khattab yang bernama Abdullah, tetapi dengan syarat anaknya itu tidak boleh dipilih. Umar berpesan kepada mereka agar memilih salah satu diantaranya untuk menjadi Khalifah (Usairy (al), 2018: 163). Setelah melakukan musyawarah yang sangat alot, maka terpilih lah Usman bin Affan menjadi Khalifah pengganti Umar.

Usman mulai memerintah dari tahun 644-656 M/23-35 H atau selama 12 tahun dalam usia 70 tahun. Usman bin Affan dalam menjalankan kekhalifahannya tidak setegas Abu Bakar dan Umar, karena ia mempunyai sifat lembut dan pemalu. Hal ini berpengaruh terhadap karakternya dalam mengambil keputusan. Sehingga dalam beberapa kasus pengangkatan pejabat, Usman cenderung tidak bisa menolak permintaan saudaranya untuk dijadikan pejabat. Kondisi semacam ini yang menyebabkan para pemerhati sejarah menganggap Usman telah menjalankan praktek nepotisme dalam pemerintahannya.

Pada masa ini mulai terjadi kekacauan dan pemberontakan hingga terbunuhnya Usman bin Affan. Pemberontakan terjadi karena banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Usman yang mengangkat keluarganya di lingkungan pemerintahannya. Pemberontakan terjadi dengan mengepung kediaman Usman bin Affan. Usman mengalami blokade atau pengepungan selama kurang lebih 40 hari. Akhirnya, para pemberontak memasuki rumah Usman, lalu mereka membunuhnya dengan pedang dan mengambil harta Baitul Mal. Maka, Usman pun terbunuh dan meninggal dunia. Usman wafat pada hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah, tahun 35 H ketika sedang membaca Al-Quran surat Al-Baqarah (Murodi, 2011, 43). Meninggalnya Usman Bin Affan nantinya akan menimbulkan masalah yang serius di kalangan umat Islam pada masa itu. Sebenarnya pembunuh Usman ialah kelompok yang berjumlah sedikit. Yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Usman ialah Al-Ghafiqi yang akhirnya

melarikan diri, sedangkan yang lain tidak diketahui (Usairy (al), 2018: 170-171). Terdapat pula sumber lain yang menyatakan bahwa Meninggalnya Usman Bin Affan karena dibunuh oleh Aswadan Bin Hamran Dari Tujib, Mesir (Ja'farian, 2003: 17).

Setelah terbunuhnya Usman, umat Islam mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah. Mereka melakukan itu agar dapat terhindar dari kemelut politik yang kacau. Akhirnya ia bersedia menjadi pimpinan tetapi ia tidak bernafsu untuk memegangnya (Usairy (al), 2018: 173). Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah pada usia 56 tahun dan Ali memerintah selama 5 tahun dari 656-661 M/35-40 H. Pada saat pengangkatannya menjadi Khalifah untuk menggantikan Usman Bin Affan, hal itu bertepatan dengan momen-momen politik yang bersifat sensitif. Pada masa Ali bin Abi Thalib permasalahan perpolitikan dalam Islam terlihat lebih menonjol dikarenakan pada masa ini banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan. Penetapan Ali sebagai Khalifah ditentang oleh sebagian umat Islam antara lain Thalhah dan Zubair diikuti oleh Aisyah. Karena hasutan Abdullah bin Zubair, mereka menuntut agar pembunuh Usman diadili. Tapi hal itu tidak dipenuhi Ali, sehingga terjadilah perang Jamal (Supriyadi, 2016: 97). Selain itu pemberontakan juga dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan Gubernur Suriah yang berasal dari keluarga Usman dengan alasan: Pertama, Ali harus mempertanggungjawabkan tentang terbunuhnya Usman. Ia harus melakukan qisas terhadap pembunuh Usman, barulah Muawiyah akan ikut berbaiat (Thabari (al), 1961: 438). Kedua, wilayah kekuasaan Islam telah meluas dan timbul komunitas-komunitas Islam di daerah-daerah baru, maka hal untuk menentukan pengisian jabatan Khalifah tidak lagi menjadi hak mereka yang berada di Madinah saja. Ketiga, Muawiyah menolak peletakan jabatan Khalifah kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terbuka menentang Khalifah dan tidak mengakuinya. Sehingga terjadinya perang Shiffin (Syaefudin, 2013: 172). Peperangan terjadi di Kota Shiffin. Perang ini hampir saja dimenangkan oleh Ali. Namun, atas kecerdikan Muawiyah yang dimotori oleh panglima perangnya Amr bin Ash, yang mengacungkan Al-Quran diatas tombak yang bertujuan untuk mengajak berdamai. Ali mengetahui bahwa itu merupakan strategi Muawiyah untuk mengalahkannya. Karena desakan, Ali menerima tawaran tersebut. Maka terjadilah peristiwa tahkim yang secara politis Ali kalah dengan Muawiyah. Dalam tahkim pihak Ali dirugikan oleh pihak Muawiyah sehingga terpecahlah dua kelompok yang mendukung Ali yakni Syiah (yang mendukung Ali) dan Khawarij (yang keluar

dari barisan Ali). Kelompok Khawarijlah yang selanjutnya mengadakan perlawanan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tahkim. Akibat perpecahan ini kekuatan Ali semakin melemah dan kemudian Ali meninggal karena dibunuh oleh Ibnu Muljam dari kalangan Khawarij yang tidak mendukung kebijakannya.

Setelah Ali wafat, kursi kepemimpinan umat Islam kemudian digantikan oleh anaknya, Hasan bin Ali. Ia kemudian diangkat menjadi Khalifah dan dibaiat oleh Qais bin Sa'ad. Kota Kufah dijadikan sebagai pusat pemerintahannya (Suyuti (al), 2006: 188). Namun, Muawiyah juga menolak pengangkatan tersebut. Muawiyah tetap berusaha mempengaruhi kelompok pendukungnya untuk menolak pengangkatan Hasan menjadi Khalifah karena hanya dialah yang pantas menjadi Khalifah. Protes ini dianggap oleh pihak Hasan sebagai pembangkangan dan mengusulkan untuk memerangi Muawiyah. Kedua kelompok tersebut kemudian bertemu di daerah Maskin. Sebelum terjadi kontak senjata antara kedua pihak, kedua kubu tersebut telah mengajukan jalan damai. Hasan memutuskan untuk menempuh jalan damai karena demi terjalannya persatuan dan kesatuan umat Islam ('Amul Jama'ah). Hal itu mengakibatkan kekuatan Hasan melemah dan kekuasaan Islam beralih ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada titik ini merupakan dimulainya era baru dalam sejarah perpolitikan Islam. Karena sejak saat itu, paling tidak kelompok Hasan dan kelompok Muawiyah dapat bersatu kembali di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan (Murodi, 2011: 2).

Setelah peristiwa itu, Hasan membuat langkah strategis untuk menghadapi berbagai persoalan yang telah terjadi diantara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi ufyah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh yaitu: Pertama, meminta para pengikutnya untuk melakukan baiat kepada Muawiyah. Setelah Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, secara otomatis Muawiyahlah sebagai penguasa tunggal yang sah. Usai penyerahan kekuasaan dan pembaiatan, Hasan dan Muawiyah pergi ke Kufah. Hasan mengumpulkan para pembesar masyarakat, seperti Abdullah bin Abbas, Qays bin Sa'ad, dan Husein bin Ali. Kemudian mereka diminta untuk melakukan apa yang ia lakukan. Maksudnya mereka harus mentaati dan mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Khalifah pengganti dirinya. Kedua, Setelah prosesi penyerahan kekuasaan dan pengakuan atas kekuasaan Muawiyah, Hasan menerima berbagai kompensasi dari Muawiyah dan ia mengajak sanak keluarga dan handai tolan untuk pergi meninggalkan kota Kufah dan menetap di kota Madinah. Walaupun sedikit

informasi mengenai alasan mengapa Hasan bin Ali dan keluarganya lebih memilih tinggal dan menetap di Madinah, ketimbang tetap berada di Kufah. Namun, hal pasti yang perlu diketahui adalah bahwa ia dan keluarganya lebih merasa aman tinggal di Madinah karena di “Kota Nabi” inilah terdapat makam kakeknya yakni Nabi Muhammad. Selain itu, kota ini memiliki letak yang relatif jauh dari kota Damaskus, Syria yang mana daerah itu menjadi pusat kekuasaan Muawiyah dan basis kekuatannya. Sehingga Hasan lebih banyak kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Tuhannya dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan kemelut kehidupan politik yang tidak menjamin kebaikan bagi diri dan keluarganya (Murodi, 2011: 162). Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai kemunduran Hasan bin Ali menjadi Khalifah. Dan pada saat itulah titik peralihan bentuk kekuasaan Islam dari kekhilafahan Khulafaurrasyidin berganti dengan bentuk kekhilafahan monarki.

Dengan adanya pendeskripsian sejarah tersebut bahwa perpolitikan umat Islam dapat dikatakan tidak lepas dari strategi atau siasat untuk mendirikan sebuah kekuasaan baru. Hal itu menjadi alasan bagi peneliti untuk mengangkat penelitian tentang peralihan kekuasaan Islam dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada penyebab, proses, dan dampak adanya peralihan kekuasaan Islam dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik dan Transisi Politik

Ketika Umar bin Khattab telah wafat, kursi *kekhilafahan* di pegang oleh Usman bin Affan yang pemilihannya sesuai dengan musyawarah “Tim Formatur” yang beranggotakan 6 sahabat yang sebelumnya ditentukan oleh *Khalifah* Umar yakni Usman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Thalhah, Zubair, dan Saad bin Waqqas. Akhirnya Usman bin Affan terpilih menjadi *Khalifah*.

Sejarawan menyatakan bahwa terdapat dua periode pada masa kepemimpinan Usman yakni enam tahun pertama (23-29 H) merupakan pemerintahan yang baik. Sedangkan enam tahun kedua (30-36 H) adalah pemerintahan yang penuh kekacauan.

Pada periode pertama merupakan masa keberhasilan Usman, diantaranya memperluas daerah kekuasaan Islam, seperti: Tripoli, Kabil, Harah, dan beberapa daerah lainnya. Perluasan Islam juga dilakukan ke daerah pantai dengan mengerahkan

angkatan laut yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 28 H dan juga dapat menaklukkan Cyprus untuk tunduk di bawah kekuasaan Islam. Selain itu ia memberikan ganjaran yang setimpal terhadap pelaku pembunuhan Umar bin Khattab.

Sedangkan pada periode kedua dikatakan sebagai masa kemunduran kekuasaan Usman. Penyebab kemundurannya dalam bidang politik adalah ia sering mengangkat keluarga dekatnya menjadi pejabat-pejabat penting atau disebut dengan nepotis. Sedangkan dalam bidang keuangan yakni adanya konflik di masyarakat dalam mengolah pendayagunaan uang negara.

Usman bin Affan menjabat sebagai Khalifah saat usianya sudah cukup tua, tetapi ia memerintah paling lama diantara Khulafaurrasyidin yang lain. Usman memiliki sikap yang lunak, sabar, shaleh, dan dermawan. Hal ini berbeda sekali dengan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab yang disiplin dan tegas dalam memimpin rakyatnya.

Usman dianggap sebagai seorang yang lemah dan tidak mampu mengatasi permasalahan keluarganya yang sangat berpengaruh dalam pemerintahannya. Dari sikapnya itu ia sering mengangkat keluarganya sendiri sebagai pejabat penting di pemerintahan, seperti: Ali Mughirah bin Syu'bah dari Kufah diganti oleh Walid bin Uqbah bin Abi Muaith (saudara Usman dari ibu), Amr bin Ash dari Mesir diganti oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah (saudara Usman sesusuan), Abu Musa Al-Asy'ari dari Basrah diganti oleh Abdullah bin Amir (anak pamannya), Zaid bin Tsabit yang mengurus administrasi diganti oleh Marwan bin Hakam (saudara sepupu Usman). Saat pengangkatan Marwan sebagai sekretaris negara, banyak masyarakat yang kurang setuju. Hal itu karena ia sangat rakus dan menempatkan keluarga Umayyah dalam kedudukan tinggi, serta membatasi peran bani Hasyim menjadi bagian penting didalamnya.

Khalifah Usman tidak memiliki sikap ketegasan layaknya Abu Bakar dan keberanian seperti Umar. Ia terlalu lemah lembut dan sangat mengasihi keluarganya. Di satu sisi hal itu menjadi sebuah gambaran bahwa ia seorang yang shaleh dan dermawan. Tetapi disisi lain dapat menyebabkan kehancuran bagi dirinya. Dalam pendayagunaan kekayaan negara, terdapat perbedaan kebijakan yang dilakukan Usman dengan Khalifah-Khalifah sebelumnya. Ia menggunakan keuangan negara berdasarkan keputusannya bahwa seorang Khalifah boleh menggunakan kekayaan negara untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya. Karena tugas Khalifah melindungi kewajiban

dan hak masyarakatnya

Kebijakan lain yang dilakukan oleh Usman adalah mewajibkan rakyat membayar pajak, kharaj, jizyah, dan zakat apabila kas baitul mal telah habis, yang disebabkan karena perang, biaya administrasi pemerintahan yang dibutuhkan oleh Khalifah dan pejabatnya.

Dalam aspek migrasi atau perpindahan penduduk, Khalifah Usman membolehkan para sahabat menuju ke berbagai daerah dan meninggalkan Hijaz. Tetapi dalam masa Umar hal itu tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan terdapat pemberontakan yang dapat menurunkan martabat masyarakatnya, kecuali izin khusus (Fu'ad, 2012: 71-75). Saat terjadi pemberontakan karena adanya penentangan terhadap kebijakan Usman, ia mengatasinya seorang diri sedangkan pengikut dan keluarganya sedang berada di luar kota Madinah (Murodi, 2011: 26).

Sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Usman mencerminkan bahwa ia tidak bisa mengendalikan pengaruh politik dari keluarganya, utamanya pada periode enam tahun terakhir kepemimpinannya. Hal itu dilakukan dengan alasan Usman telah mengenal dekat dengan orang-orang tersebut dan memiliki keahlian di bidangnya. Selain itu ia juga menggunakan keuangan negara untuk kepentingannya sendiri dan keluarganya, sehingga dia dituduh sebagai orang yang suka mengambur-hamburkan uang masyarakat. Kemudian dari kebijakan itu menimbulkan protes hingga perlawanan terhadap Usman.

Syekh Mahmuddunnasir, ia mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan terhadap Khalifah Usman. Pertama, keluarga Umayyah dari suku Quraisy sering merintangi perjuangan Nabi Muhammad melalui penindasan, penganiayaan, dan kemudian masuk Islam berdasarkan keuntungan duniawi karena mereka akan hancur apabila membangkang sewaktu penaklukan Mekkah. Namun pada masa pemerintahan Usman, kelompok ini menduduki jabatan-jabatan penting. Kedua, saat pemerintahan Usman di Madinah, rakyat disana semakin kehilangan posisi serta kedudukan dalam pemerintahan dan tidak banyak memperoleh jabatan dalam pemerintahan. Ketiga, penggantian Zaid bin Tsabit dengan Marwan bin Hakam sebagai sekretaris negara membuktikan adanya dominasi keluarga Umayyah dan menggeser kedudukan Bani Hasyim. Keempat, adanya rasa tidak puas dikalangan masyarakat atas sikap ketidaktegasan Usman mengatasi berbagai persoalan. Kelima,

terjadi fitnah terhadap Usman yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba' seorang Yahudi yang masuk Islam dan pernah diusir dari Basrah, Kufah, dan Syiria yang akhirnya menetap di Mesir. Ia memfitnah Usman bin Affan karena merasa tidak menyukai kebijakan yang dilakukannya.

Dari sebab-sebab diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Usman pada masa pemerintahannya terutama pada enam tahun kedua mendapat banyak pertentangan. Seperti: pemberontakan di Kufah pada tahun 655 M dan di Mesir tahun 656 M.

Kondisi ini dimanfaatkan Abdullah bin Saba' untuk memecah belah umat Islam dengan cara memfitnah Usman yang dituduh melakukan perampasan hak *Khalifah* untuk Ali bin Abi Thalib. Hal itu sesuai dengan konsep *Wishayah* yang dikemukakannya, dimana Rasulullah telah berwasiat agar menunjuk Ali sebagai *Khalifah* sebab menjadi kelaziman bagi para Nabi mengadakan wasiat dalam menentukan penggantinya. Propaganda tersebut semakin menambah kebencian rakyat Mesir terhadap Usman.

Rakyat Mesir, Basrah, dan Kufah bekerja sama melakukan perlawanan terhadap Usman. Hal ini menjadi puncak kebencian masyarakat pada masa itu. Sebanyak 600 orang Mesir berangkat menuju Madinah. Ditengah perjalanan mereka bertemu dengan rakyat Basrah dan Kufah, maka mereka bersma-sama menemui Usman dan menyampaikan aspirasinya. Kemudian Usman berhasil memberikan pengertian kepada kafilah Kufah dan Basrah, sedangkan kepada pemberontak dari Mesir Usman berjanji untuk menggantikan Gubernur Abdullah bin Sa'ad dengan Muhammad bin Abi Bakar. Namun, di tengah perjalanan pulang menuju Mesir, mereka mendapati sepucuk surat dengan stempel milik *Khalifah* yang berisi perintah kepada Gubernur Abdullah bin Sa'ad jika kelompok ini tiba di Mesir, maka mereka akan dibunuh.

Lalu kelompok tersebut meminta pertanggung jawaban Usman tentang isi surat tersebut, maka mereka datang kepada Usman kembali. Jawabannya menghenyakkan kelompok Mesir. Usman merasa tidak pernah menulis surat tersebut. Dan ternyata Marwan bin Hakam yang telah menulisnya dengan menggunakan stempel *Khalifah* juga tidak memberitahukannya. Seketika itu kelompok Mesir ini marah dan meminta Marwan diserahkan untuk diadili. Hal itu ditolak oleh Usman. Kemudian kelompok Mesir itu mengepung rumah Usman. Dalam peristiwa itu Usman sendirian tanpa ada pembelaan dari keluarga dan pengikutnya.

Saat itu malah Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husein beserta kawan-kawannya yang menolong Usman dan berusaha menghentikan perlawanan itu. Tetapi kelompok Mesir itu jumlahnya sangat banyak, maka mereka berhasil memasuki rumah Usman dan membunuhnya saat sedang membaca Al-Quran pada tanggal 17 Juni 656 M. Ada yang mengatakan bahwa yang memukul kepalanya adalah Al-Ghafiki, yang menebas lehernya ialah Sudan bin Hamran, dan yang membunuh pembantunya yaitu Quthairah. Dalam kondisi tersebut keluarganya menjauhinya agar memberikan kesan bahwa wafatnya Usman adalah akibat perselisihan antara *Khalifah* dengan umat Islam, bukan perselisihan dengan keluarga Umayyah.

Peristiwa ini berdampak pada kondisi politik Umat Islam. hal itu menyebabkan timbulnya perpecahan antar suku. Selain itu tragedi pembunuhan Usman menjadi awal adanya perang saudara dalam Islam, seperti perang Shiffin, perang Jamal, Karbala, dan sebagainya. Pada tanggal 24 Juni 656 M, satu minggu setelah meninggalnya Usman, masyarakat membaiai Ali bin Abi Thalib untuk menjadi *Khalifah*. Pengangkatannya bertepatan dengan kacaunya kondisi politik umat Islam (Fu'ad, 2012: 76-81). Hubungan kedekatan dan kekerabatannya dengan Nabi Muhammad menjadi alasan masyarakat untuk memilihnya. Hal itu sebagai langkah yang tepat menjadikan Ali sebagai pemimpin (Murodi, 2011: 47). Terdapat pertentangan kecil yang dilakukan para sahabat atas pengangkatan Ali menjadi *Khalifah*. Sehingga jalan yang ditempuhnya untuk menjadi pemimpin tidak semulus para *Khalifah* sebelumnya. Ali dibaiai oleh masyarakat yang mendukungnya seperti rakyat Mesir, Basrah, dan Kufah. Awalnya ia menolak untuk dijadikan *Khalifah*, tetapi karena desakan masyarakat dan untuk kemaslahatan umat dengan terpaksa dia menerimanya.

Thalhah dan Zubair pada awalnya menentang Ali bin Abi Thalib menjadi *Khalifah*. Namun akhirnya, dengan terpaksa keduanya menyatakan sumpah setianya dengan syarat Ali harus menghukum pembunuh Usman. Begitu pula Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia menyatakan sumpah setianya kepada Ali saat umat Islam telah mealakukannya. Sedangkan kelompok Umayyah pergi ke Syiria yang bertujuan menghindari proses pemilihan Ali dan selain itu menghadap Muawiyah yang tengah berkuasa disana. Mereka membawa pakaian Usman yang penuh dengan darah dan potongan jari-jari Nailah (isteri Usman). Bukti-bukti itu akan dijadikan alasan Muawiyah untuk mengajak rakyat menentang pemerintahan Ali (Fu'ad, 2012: 84-86).

Kemudian saat Ali menjadi *Khalifah*, ia menyusun kebijakan, yaitu mengganti pejabat yang diangkat Usman dengan pejabat dan tanah-tanah yang dibagikan Usman kepada keluarganya melalui cara yang tidak sah di tarik kembali oleh Ali. Atas kebijakan Ali tersebut banyak penentangan yang dilakukan oleh bani Umayyah sehingga mereka melakukan perlawanan terhadapnya. Seharusnya Ali bin Abi Thalib tidak melakukan kebijakan yang dianggap keras seperti itu sampai suasana menjadi stabil. Namun, dengan tekad yang kuat ia tetap melakukannya.

Selain itu terdapat perlawanan yang dilakukan oleh Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Mereka melakukan pertentangan terhadap Ali karena ia belum melakukan hal yang adil pada pembunuh Usman. Kemudian datanglah pasukan Aisyah, Thalhah, dan Zubair ke Basrah. Hal itu diketahui oleh Usman bin Hanif, Gubernur Basrah. Lalu pasukan Aisyah, Thalhah, dan Zubeir menemuinya dengan maksud menuntut keadilan atas kematian Usman. Maka Gubernur Basrah itu membolehkan mereka menemui Ali.

Kemudian hal ini terdengar oleh Ali. Awalnya, ia sudah memberi pengertian kepada pasukan Aisyah, Thalhah, dan Zubair, tetapi hal itu tidak diterima dengan baik oleh mereka, maka terjadilah perang Jamal. Karena pada saat itu Aisyah menunggangi unta (Fu'ad, 2012: 92-94). Pada peperangan ini pasukan Aisyah kalah. Thalhah dan Zubair gugur dalam medan perang dan Aisyah dikembalikan ke Madinah (Hitti, 2010: 224). Lalu *kekhalifahan* Ali diakui lagi setelah perang usai.

Seperti yang diketahui, kebijakan yang dilakukan Ali adalah salah satunya mengganti Gubernur yang diangkat Usman dengan yang baru. Namun, ada yang tidak menghiraukan hal itu yaitu Muawiyah. Ia adalah Gubernur Syam yang tidak setuju diganti dengan Sahal bin Hunaif. Muawiyah tidak terima apabila jabatannya itu diberikan kepada orang lain. Selain itu ia juga memfitnah Ali terlibat dalam proses pembunuhan Usman dan melindungi para pelaku (Hafsin: 64).

Muawiyah dan pendukungnya tidak mengakui *kekhalifahan* Ali. ia didukung oleh masyarakat Syiria yang sudah bertahun-tahun di pimpinnya. Mereka beralasan untuk meminta keadilan atas terbunuhnya Usman. Selain itu, Muawiyah ingin menjatuhkan martabat Ali di hadapan umat.

Ambisi politiknya semakin besar. Muawiyah membawa baju Usman yang penuh dengan darah dan potongan jari-jari isterinya untuk melawan kepemimpinan Ali. Apabila *Khalifah* tidak dapat menemukan dan menghukum pembunuh Usman, maka ia

tidak berbaiat kepadanya. Hal ini juga digunakan Muawiyah untuk mengajak massa agar kebencian terhadap Ali semakin besar (Fu'ad, 2012: 87-88). Kekuatan Muawiyah semakin besar ketika bani Umayyah bergabung ke pihaknya. Selain itu ia juga mendapat dukungan dari politikus yang cerdik bernama Amr bin Ash. Disamping itu Muawiyah telah menguasai daya dan pendapatan daerah yang dikuasainya itu. Sehingga secara jelas pasukannya cukup kuat untuk melawan Ali.

Kemudian Ali mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bujali untuk mengirim surat kepada Muawiyah. Hal ini dilakukan karena ia ingin menghindari pertumpahan darah antar sesama muslim. Namun, apa yang dilakukan Ali untuk berdamai mengalami kegagalan. Karena tidak adanya jalan damai, maka pasukan yang berjumlah 50.000 prajurit berangkat dari Kufah untuk melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah. Kemudian pasukan itu bertemu di daerah Shiffin di sebelah barat sungai Furath.

Saat perang akan dimulai Ali memberikan arahan kepada prajuritnya agar tidak semena-mena menghadapi musuh, seperti: ia melarang pasukannya untuk tidak membunuh musuh yang melarikan diri, tidak menyerang orang yang tidak berdaya, tidak mengganggu wanita meskipun kehormatan mereka direndahkan, dan tidak boleh mencela pemimpin dan orang baik.

Kemudian terjadilah perang Shiffin pada bulan Safar tahun 37 H. pasukan Ali mendesak para prajurit Muawiyah. Ia merasa kalah. Sedangkan Ali akan mencapai kemenangan. Melihat kondisi seperti itu, Muawiyah mengikat Al-Quran di ujung tombaknya sebagai bentuk perdamaian. Tetapi, Ali mengetahui hal itu adalah hanya strategi Muawiyah untuk terhindar dari kekalahan.

Niatan Ali untuk meneruskan peperangan dengan Muawiyah tidak sesuai dengan keinginan pendukungnya. Para prajuritnya meminta agar ia menerima perdamaian dari Muawiyah itu. Maka, secara terpaksa Ali menyetujuinya dan peperangan itu berhenti.

Setelah peperangan berhenti, kedua belah pihak mengajukan wakilnya untuk menyelesaikan pertempuran itu. Pihak Muawiyah dengan kompak memilih Amr bin Ash. Sedangkan kelompok Ali terjadi perbedaan pendapat. Awalnya ia tidak memilih Abu Musa Al-Asy'ari. Tetapi, sebagian besar pendukungnya mendesaknya untuk memilih Abu Musa. Dengan cara terpaksa dia memilihnya. Peristiwa ini disebut dengan Tahkim.

Lalu bertemulah wakil kedua pihak. Masing-masing mengajukan aspirasinya. Kemudian Amr bin Ash berkata kepada Abu Musa, “Bagaimana sebaiknya menurut anda?”. Abu Musa menjawab, “Sebaiknya kita berhentikan kedua orang ini, lalu kita serahkan kepada kaum muslimin untuk memilih siapa yang mereka senangi.” Pendapat Abu Musa disetujui oleh Amr. Kemudian keduanya menemui kelompoknya masing-masing. Abu Musa Al-Asy’ari diminta Amr bin Ash untuk mengumumkan hasil yang mereka sepakati. Ketika Abu Musa berdiri, Ibnu Abbas merasa curiga dan berkatalah ia kepadanya, “Hati-hatilah engkau demi Allah, sesungguhnya aku merasa engkau telah ditipu”. Ibnu Abbas membeitahu Abu Musa untuk mendahului Amr dalam berbicara. Tetapi ia tidak menggubris hal itu, sehingga ia mengumumkan bahwa mereka telah menyepakati bahwa Ali dan Muawiyah diberhentikan dari jabatannya. Lalu Amr berdiri dan berkata, “Sesungguhnya orang ini telah berkata sebagaimana yang kalian dengar dan dia telah memberhentikan temannya, akupun memberhentikan sahabatnya itu sebagaimana ia memberhentikannya, dan sekarang aku mengangkat Muawiyah sahabatku, sebab ia seorang kerabat yang berhak menuntut bela terhadap darah Usman dan orang yang sangat berhak menggantikan kedudukannya”.

Setelah kejadian ini, hal itu menimbulkan pro dan kontra antara penentang dan pendukung Ali atau dalam artian antar kelompok oposisi dengan pemerintah. Sehingga fanatisme dan sikap ashabiyah tumbuh subur (Munawir, 1985: 84-85). Pihak Ali merasa dirugikan sedangkan Muawiyah diuntungkan. Hal itu juga menimbulkan perpecahan dalam kubu Ali menjadi dua golongan yakni Syiah (pendukung Ali) dan Khawarij (penentang Ali) (Munawir, 2012: 88-91).

Keputusan itu tidak begitu saja diterima Ali. ia ingin kembali menyerbu Muawiyah di Syiria. Namun, saat itu bertepatan dengan kelompok Khawarij yang melakukan perlawanan kepadanya. Sehingga Ali harus berangkat ke Nahrawan untuk melawan mereka. Pertentangan kelompok Khawarij terjadi pada tahun 658 M. Saat yang bersamaan pula Muawiyah dapat merebut Mesir karena adanya jasa Amr bin Ash dan ia diangkat menjadi Gubernurnya.

Setelah lama kondisi politik yang kacau mulai mereda. Kelompok Khawarij dengan sembunyi-sembunyi telah melakukan kerja sama untuk melawan Ali, Muawiyah, dan Amr pada waktu yang sama yakni pada tanggal 17 Ramadhan tahun 40 H/24 Januari 661 M. Yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib ialah Abdurrahman bin

Muljam, Amru bin Bakar At-Tamimi pergi ke Mesir untuk menumpas Amru bin Ash, sedangkan Muawiyah akan dihabisi oleh Al-Bakar At-Tamimi, maka ia menuju ke Syiria. Atas rencana itu, keberhasilan diraih oleh Ibnu Muljam karena ia dapat membunuh Ali saat menuju ke masjid untuk mengimami sholat shubuh pada hari Jumat.

Kemudian Ali meninggal dunia. Al-Bakar bin Abdullah berhasil menikam Muawiyah tetapi tidak sampai mati. Sedangkan Amr bin Bakar gagal menumpas Amr karena tidak pergi ke masjid untuk menjadi imam sholat shubuh sebab ia sedang sakit di rumahnya dan ia digantikan oleh Kharijah bin Habib Al-Sahami. Amr bin Bakar salah sasaran ia telah membunuh Kharijah sebab dia menyangka itu Amr bin Ash (Munawir, 2012: 95-96).

Setelah Ali wafat, kekhalifahan digantikan oleh anaknya, Hasan bin Ali. Sebagian umat Islam pendukung Ali berusaha menstabilkan situasi dan kondisi dengan mengangkat Hasan sebagai Khalifah. Menurut riwayat Ibnu Al-Bakar bin Abdullah, yang terlibat dalam pemilihan Hasan kurang lebih berjumlah 40.000 orang. Qays bin Sa'ad adalah orang pertama yang membaiainya. Kemudian diikuti oleh umat Islam. Proses pengangkatan ini dilakukan karena mereka meyakini bahwa Hasan adalah seorang yang dapat diandalkan untuk mengatasi persoalan umat. Ia diangkat menjadi pemimpin pada tahun 41 H/661 M yang bertepatan dengan bulan Ramadhan (Murodi, 2011: 67). Namun, sikap Muawiyah tetap tidak menyetujui hal itu. Ia tidak mau mengakui Hasan menjadi Khalifah dan ia tetap dengan ambisinya yaitu ingin menjadi pemimin di kalangan umat Islam.

Atas ketidaksenangan Muawiyah karena Hasan terpilih menjadi Khalifah, maka ia menyusun strategi untuk melawan Khalifah. Hal ini menjadi usahanya untuk mengajukan keinginannya menjadi seorang pemimpin. Meskipun Hasan tidak memiliki pengalaman menjadi seorang pemimpin, tetapi hal itu menjadi penghalang bagi Muawiyah untuk mencapai kesuksesannya.

Kemudian terdengar berita tentang Muawiyah akan menyerang Hasan, maka Qays menyarankan melakukan penyerangan terlebih dahulu. Sebenarnya Hasan tidak menyukai segala bentuk pertempuran. Akhirnya dengan terpaksa ia menerima tawaran itu. Hasan Bin Ali mengirim pasukan sejumlah 12.000 dengan di komandoi oleh Qays. Saat pasukannya berada di daerah Madain, Muawiyah membuat strategi dengan menyebarkan berita tentang kematian Qays. Tanpa melakukan penyelidikan Hasan

menghentikan serangan tersebut dan menyelesaikan persoalan dengan jalan damai.

Hasan dan Muawiyah melakukan tukar-menukar utusan dan kedua belah pihak melakukan perdamaian. Pada saat itu Hasan dan pasukannya menyambut Muawiyah. Lalu Amr bin Ash berkata, “Aku melihat pasukan sangat banyak yang tidak akan mundur hingga kamu membunuh sebagian besarnya.” Jawablah Muawiyah, “Amr, jika orang-orang itu terbunuh, siapa yang akan mengurus mereka? Siapa yang akan merawat ana-anak dan orang tua mereka?”

Kemudian dikirimlah 2 utusan Muawiyah dari suku Quraisy dari Bani Abd Syams yakni Abdurrahman bin Samurah dan Abdullah bin Amr bin Kuraiz dan disisi lain Hasan mengirim utusan bernama Abdullah bin Harits bin Nauval. Utusan Muawiyah menawarkan perdamaian dengan Hasan. Ia akan menjamin keselamatan dirinya dan keluarganya serta umat Islam yang tengah bertikai. Selain itu, apapun permintaan Hasan akan dikabulkan oleh Muawiyah. Akhirnya, Hasan bersedia berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan (Murodi, 2011: 123).

Dalam kondisi ini Hasan tidak menggunakan kekuasaannya dalam menyelesaikan persoalan umat. Namun, ia berjalan sendiri. Keinginannya ia sampaikan kepada Abdullah bin Abbas dan Husein bin Ali untuk memberikan kekuasaannya itu kepada Muawiyah. Hal itu dilakukan karena Hasan ingin menyelesaikan segala persoalan dengan cara damai. Akibatnya para pendukungnya merasa kecewa atas tindakannya.

Hasan menjadi Khalifah selama kurang lebih enam bulan. Lalu ia menyerahkan kekuasaannya itu kepada Muawiyah. Ia tidak ingin terjadi perpecahan antar umat yang disebabkan oleh dirinya dan ia merasa tidak mampu menjadi figur Khalifah yang selama ini diharapkan umat atau kemungkinan ia terkena teror oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya (Murodi, 2011: 75-78). Maka dari itu, tidak ada jalan lain selain ia harus melakukan perdamaian dengan Muawiyah untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya (Husaini (al), 1989: 654). Dalam kesempatan ini, Muawiyah memanfaatkannya dengan baik. Ia melakukan berbagai tawaran diplomasi agar Hasan bersedia mundur dari kursi kekhalifahan dan menyerahkan kekuasaan kepadanya. Hasan menyetujui hal itu. Kemudian peristiwa ini dikenal dengan sebutan Amul Jamaah artinya tahun persatuan yang terjadi pada tahun 41 H/661 M.

Untuk mengakhiri perselisihan antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka tidak ada pilihan lain kecuali ia melakukan perdamaian dengan

Muawiyah. Untuk itu, Hasan mengutus Amr bin Sulaiman untuk mengirim surat perdamaian kepada Muawiyah. Dalam surat itu berisi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Muawiyah apabila ingin menjadi *Khalifah* yang menjadi bentuk legalitas kepemimpinannya yang diakui oleh umat (Murodi, 2011: 122). Di antara isi persyaratan-persyaratan yang diajukan dalam peralihan kekuasaan Islam dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah sebagai berikut:

1. Mengamalkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Sunnah Khulafaurrasyidin

Hasan meminta Muawiyah agar mengamalkan kitab Allah, sunnah Rasulullah, dan sunnah Khulafaurrasyidin. Hal ini menjadi bukti penghormatan Hasan kepada Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Saking hormatnya Hasan kepada keempat orang ini, sampai-sampai ia menjadikan pengamalan Al-Quran, dan sunnah Khulafaurrasyidin sebagai salah satu syarat perdamaian. Syarat ini berisi tuntutan pada kekuasaan Muawiyah agar menentukan referensi dan pedoman berdasarkan hal-hal tersebut.

2. Kompensasi Finansial

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Muawiyah adalah bahwa ia harus tetap memberikan sebagian harta baitul mal kepada Hasan. Tetapi menurut Ali Muhammad Ashallabi, Hasan hanya meminta untuk tetap memberikan harta yang selama ini diperolehnya dan orang-orang bani Abdul Muthalib lainnya.

3. Jaminan Keamanan

4. Seluruh individu tanpa terkecuali dijamin keamanannya dan tidak dihukum karena kesalahan yang pernah dilakukannya. Hasan meminta kepada Muawiyah jaminan keamanan jiwa dan harta terhadap seluruh pengikutnya, terlebih terhadap orang-orang Bani Abbas dan Bani Abdul Muthalib. Hasan juga memberikan syarat kepada Muawiyah bahwa ia tidak boleh menuntut apapun dari masyarakat Madinah, Hijaz, Dan Irak. Sebab itu telah menjadi keputusan saat Ali bin Abi Thalib menjadi *Khalifah* (Syallabi (al), 2017: 525-535).

5. Setelah Muawiyah meninggal kekhilafahan harus diserahkan dan ditentukan sepenuhnya kepada Umat Islam.

6. Muawiyah tidak boleh mencela keluarganya, seperti: mencaci maki bapaknya yakni Ali bin Abi Thalib serta keluarganya.

Kemudian persyaratan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu Hasan mengirim surat kepada Muawiyah agar mereka bertemu di daerah Maskin. Keduanya tidak bertemu secara langsung satu meja tetapi saling berseberangan di jembatan Manhaj dekat sungai Tigris. Mereka berunding di tempat itu. Selama tujuh hari peristiwa itu berlangsung. Pada hari terakhir Muawiyah menyampaikan sebuah permintaan yaitu Qays harus diserahkan kepadanya untuk di potong tangan dan lidahnya, tapi Hasan menolak permintaannya. Ia mengancam apabila Muawiyah tetap memaksakan kehendaknya, ia tidak akan membaiaatnya. Melihat ancaman ini, Muawiyah membatalkan keinginannya tersebut.

Lunaknya sikap Muawiyah karena permintaan terakhirnya ditolak oleh Hasan menjadi sebuah kekuatan bagi seorang pemimpin. Dan juga hal itu adalah siasatnya agar Hasan segera menyerahkan kekuasaan kepadanya. Sekitar bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir tahun 41 H/661 M, Hasan menyerahkan kekuasaan Islam kepada Muawiyah. Setelah itu, Hasan pulang ke rumahnya di daerah Madain (Murodi, 2011: 123-124). Hal itu merupakan bukti dari Hadits Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Hasan akan menyatukan dua kelompok besar yang saling bermusuhan. Al-Biquni menganggap bahwa Hasan turun dari jabatan kekhalifahan sebagai patokan diperbolehkannya seorang pemimpin untuk mengundurkan diri dari jabatannya (Suyuti (al), 2006: 188-189).

Setelah proses pembaiatan Hasan dan Muawiyah menuju ke Kufah. Saat itu pula para pemimpin masa dan pengikutnya dikumpulkan dan diminta untuk berbaiat kepada Muawiyah. Permintaannya itu dilakukan agar kepemimpinan Muawiyah diakui. Setelah mendapat pengakuan dari Hasan dan masyarakat Kufah. Muawiyah kemudian menuju ke Basrah agar masyarakatnya juga berbaiat kepadanya. Namun, ternyata masyarakat Basrah tidak mau beribadah kepada Muawiyah. Karena harta umat Islam, meskipun itu sebuah kekuasaan tidak boleh diberikan oleh siapapun dengan cara yang tidak sah, termasuk yang dilakukan Hasan itu adalah hal yang kurang disetujui oleh penduduk Basrah.

Walaupun Muawiyah tidak mendapat pengakuan dari masyarakat Basrah, tetapi ia terus melakukan propaganda ke seluruh masyarakat agar mereka tunduk kepada Khalifah yang baru, karena Hasan telah mengakui kekuasaannya (Murodi, 2011: 124-127). Akhirnya dibawah pimpinan Muawiyah umat Islam bersatu (Ibnu Katsir, 2014:

705).

Secara de jure dan de facto kedudukan Muawiyah semakin kuat. Muawiyah telah memegang erat kekuasaan, yang mana hal itu sangat diimpikannya. Marshal G. Hodgson mengatakan bahwa akhirnya Muawiyah diterima sebagai Khalifah umat Islam meskipun dalam memperoleh kekuasaan itu dengan cara terpaksa atau tidak (Hodgson, 1974: 216). Hal itu membuat terbentuknya dinasti Umayyah yang mengubah sistem pemerintahannya dari demokrasi ke bentuk monarki.

Konsekuensi Politik

Terdapat dampak politik yang ditimbulkan dari proses peralihan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu:

1. Adanya pengerasan ideologi yang semula berdasarkan musyawarah berganti ke sistem temurun (monarki) (Murodi, 2011: 198).
2. Terdapat pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij.

Perlawanan terus dilakukan oleh golongan ini sejak awal pemerintahan Muawiyah hingga masa sesudahnya. Antara kaum Khawarij dan masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib sampai masa pemerintahan Hasan bin Ali memang ada semacam hubungan, yaitu mereka dulunya pernah menjadi pengikut Ali, bahkan menjadi bala tentaranya. Setelah Muawiyah meninggal, kelompok Khawarij menggabungkan diri dengan Abdullah bin Zubeir di Makkah. Akan tetapi, kemudian mereka menyempal lagi dan menganggap diri mereka bersalah karena telah memberikan pertolongan kepada Abdullah bin Zubeir di Makkah. Akhirnya mereka terpecah menjadi dua golongan yakni *Azariqah* dan *Najdat*.

Meskipun Kelompok Khawarij terus digempur pemerintah. Gerakan ini tidak hanya berhenti pada masa-masa awal dan pertengahan pemerintahan bani Umayyah, juga pada masa-masa akhir pemerintahan. Gerakan terakhir yang dilakukan oleh kelompok Khawarij pada masa akhir pemerintahan bani Umayyah adalah perlawanan yang dipimpin oleh Hamzah Al-Khariji di Makkah pada tahun 129 H, dan berhasil menguasai Makkah dan Madinah pada tahun 130 H. Tetapi kelompok ini dapat dihancurkan ketika Marwan bin Muhammad, *Khalifah* terakhir bani Umayyah mengirimkan pasukan guna menggempur kelompok pemberontak ini (Murodi, 2011: 200-203).

3. Terdapat sekelompok orang yang haus kekuasaan dan berusaha merebut simpati Muawiyah di dalam barisan pendukungnya.

Seperti, saat mengatasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di Kufah, Muawiyah berencana mengangkat Amr bin Ash, tetapi di protes oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Karena menurut Al-Mughirah sama saja memelihara anak macan. Kemudian Al-Mughirah sendiri ditunjuk menjadi Gubernur Kufah. Keputusan ini juga diprotes Amr, karena Al-Mughirah dianggap orang yang mengambil pajak tanah untuk dirinya dan tidak disetor ke Muawiyah. Hal itu, menjadi intrik politik yang kemungkinan suatu saat akan menghancurkan kekuatan Muawiyah sendiri bila ia tidak mampu mengatur konflik internal yang terjadi di pemerintahannya. Demikian hal itu dapat diatasi Muawiyah. Ia memenuhi semua keperluan kelompoknya agar mereka tidak terpecah menjadi beberapa fraksi yang akan mengganggu kinerja pemerintahan Muawiyah. Karena Muawiyah menganggap, masih banyak tugas yang akan dikerjakan, termasuk didalamnya memulihkan keamanan dalam negeri dengan mengatasi berbagai gejolak akibat politik dan sosial. Oleh karena itu, banyak kelompok yang tidak suka atas kepemimpinannya ketika itu (Murodi, 2011: 199-200).

4. Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Husein bin Ali dan kelompok At-Tawwabun (orang-orang yang bertobat), karena kebijakan Muawiyah yang mengangkat Yazid sebagai *Khalifah* penggantinya.
5. Perlawanan Abdullah bin Zubeir

Abdullah bin Zubeir adalah anak pertama yang dilahirkan dalam kalangan Muhajirin di Madinah. Ayahnya adalah Zubeir bin Awwam dan ibunya bernama Asma'. Abu Bakar As-Shiddiq adalah Kakeknya dari pihak ibu dan Shafiyah binti Abdul Muthalib adalah bibi Rasulullah, nenek dari pihak ayahnya. Sedangkan Aisyah, isteri Rasulullah merupakan Bibinya.

Setelah Yazid meninggal, Abdullah bin Zubeir dengan mudahnya menyatakan dirinya menjadi pemimpin umat sebagai *Khalifah* dan menentang pemerintahan bani Umayyah. Gerakannya semakin membesar karena ia didukung oleh penduduk Hijaz. Kemudian Abdul Malik *Khalifah* bani Umayyah mengirim pasukan yang berjumlah 2.000 pasukan yang

dipimpin oleh Al-Hallaj bin Yusuf untuk melawan Abdullah bin Zubeir. Ia tidak berani menemui lawannya, maka ia tetap berada di Masjidil Haram. Karena itu, Al-Hallaj menggempur Masjidil Haram dengan manjanik. Pendukungnya kemudian pergi meninggalkan Abdullah bin Zubeir dan begitu pula keluarganya serta kedua putranya yaitu Hamzah dan Khabib (Murodi, 2011: 242).

Konsekuensi Teologis

Peristiwa peralihan kekuasaan Islam dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tidak hanya berdampak secara politik dengan munculnya golongan atau kelompok orang yang melakukan gerakan perlawanan yang dilakukan, tetapi menimbulkan juga dampak secara teologis (keagamaan). Teologi merupakan ilmu yang menjelaskan tentang tauhid dan tauhid sama artinya dengan aqidah. Dalam sejarah Islam (Sibli, 2015: 109). Aliran-aliran keagamaan yang ditimbulkan ada yang terlahir sejak masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan ada juga yang terlahir setelah adanya peralihan kekuasaan Islam dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penulis menyajikan aliran-aliran keagamaan yang telah ada sejak pemerintahan Ali karena hal itu berhubungan dengan gejolak politik saat peralihan kekuasaan Islam dari Hasan kepada Muawiyah. Beberapa aliran tersebut adalah Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Ahlussunnah wal Jamaah.

Menguatnya kelompok tertentu dalam masyarakat untuk meredam persoalan muncul dalam berbagai golongan baik yang mendukung atau menentang penguasa. Hal ini mengakibatkan mayoritas umat Islam yang sebagian besar ulama fiqih dan pembawa Sunnah bersatu yang disebut dengan “Jamaah” atau dalam perkembangannya dinamakan “Ahlussunnah Wal Jamaah”. Munculnya aliran ini dirasa segala urusan sudah saatnya dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini bertujuan untuk menyelesaikan urusan berdasarkan sunnah Nabi dan para sahabat serta memurnikan kembali ajaran Islam.

SIMPULAN

Konflik antara kubu Muawiyah dan Hasan merupakan residu dari konflik yang telah bermula dari periode kepemimpinan umat Islam sebelumnya. Utamanya sejak terbunuhnya Utsman bin Affan. Hal paling menarik dari perjumpaan dua figur historis ini adalah catatan emas dari keberanian serta kelapangan hati pemimpin untuk

mengambil solusi damai guna mengakhiri pertikaian berdarah antara sesama muslim. Meskipun pilihan itu dalam perjalanan sejarah tidak sepenuhnya menutup pintu konflik di masa-masa selanjutnya, tetapi langkah kenegarawanan itu bisa menjadi contoh sekaligus bukti bahwa tidak semua perbedaan kepentingan dalam tubuh umat Islam harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Hasan telah memberikan keteladanan nyata bahwa persatuan dan persaudaraan Islam jauh lebih berharga dari hanya sekedar jabatan politik dan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Alvarendra, Kenzou. *Buku Babon Sejarah Dunia*. Yogyakarta: Brilliant Books. 2017.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Fu'ad, Zakki. *Sejarah Peradaban Islam Paradigma Teks, Reflektif, Dan Filosofis*. Surabaya: Indo Pamaha. 2012.
- Gottschaalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, Cet. 5, Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press. 1986.
- Hafsin, Abu, Dkk. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Khilafah*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyah*. Mesir: Darut Taufiqiyah Li Turast. 2013.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*, Terj. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2010.
- Hodgson, Marshall. G. S. *The Venture of Islam Jilid 1*. Chicago: Chicago University Press. 1974.
- Husaini (al), Al-Hamid. *Imam Muhtadin Sayyidina Ali Bin Abi Thalib R. A*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1989.
- Ja'farian, Rasul. *Sejarah Islam Sejak Wafat Nabi SAW Hingga Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah (11-132 H)*, Terj. Ilyas Hasan. Jakarta: Lentera Basritama. 2003.
- Jones, Pip; Bradbury, Liz; Le Boutiller, Shaun. *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993.

- Katsir, Ibnu. *Albidayah Wan Nihayah*, Terj. Abu Ihsan Al Atsari. Jakarta: Darul Haq. 2014.
- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah*, Terj. Masturi Ilham, Malik Supar, Abidun Zuhri. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2017.
- Munawir, Imam. *Mengapa Umat Islam Dilanda Perpecahan*. Surabaya: Bina Ilmu. 1985.
- Murodi. *Rekonsiliasi Politik Umat Islam (Tinjauan Historis Peristiwa 'Am Al-Jama'ah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid II*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sami. *Jejak Khulafaur Rasyidin 3 Ustman Bin Affan*. Jakarta: Almahira. 2014.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2016.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Suyuti (al), Imam Jalaluddin. *Tarikh Al-Khulafa. Mesir: Al-Maktab Al-Thaqafy*. 2006.
- Syaefudin, Machfud, dkk. *Dinamika Peradaban Islam Prespektif Historis*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013.
- Syallabi, Ahmad. *Sejarah Kebudayaan Islam 2*. Jakarta: Pustaka Al Husna. 1988.
- Syallabi (al), Ali Muhammad. *Biografi Hasan Bin Ali*. Jakarta: Ummul Qura. 2017.
- Thabari (al), Imam. *Tarikh At-Thabari*. Mesir: Darul Ma'arif. 1961.
- Usairy (al), Ahmad. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media. 2018.

Skripsi

- Rasyid, Sorayah. "Dinamika Politik Di Dunia Islam (Studi Tentang Perilaku Politik Muawiyah Kaitannya Dengan Pembentukan Dinasti Dalam Islam)". *Jurnal Adabiyah*. Vol XI. No. 2, 2011.
- Sabli, Muhammad. "Aliran-Aliran Teologi Dalam Islam (Perang Shiffin Dan Implikasinya Bagi Kemunculan Kelompok Khawarij Dan Murjiah)". *Jurnal Nur El-Islam*. Voleme 2. No. 1, 2015.